

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF OLEH DINAS PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUNINGAN

Nurjaman Melik¹, Endah Vestikowati², Dini Yuliani³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: meliksulung69@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Produktif Oleh Dinas Pertanian Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Kuningan. hambatan-hambatan yang dialami dan upaya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara Sistematis, Faktual, dan Akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian Kualitatif Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, atau kelompok atau suatu kejadian. Informan sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan masih belum optimal dikarenakan hambatan-hambatan yang terjadi karena kurang memperhatikan empat faktor yang mendukung keberhasilan Implementasi Kebijakan menurut Edward III. hal ini dapat terlihat dari dimensi komunikasi informasi tentang kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif yang sudah disampaikan secara jelas dan terperinci sehingga dapat dipelajari dan difahami agar dapat diimplementasikan di lapangan, namun masih ada yang kurang memahami dan mempelajarinya, dan hal ini akan mempersulit dalam mengimplementasikannya di lapangan. Pada dimensi sumber daya tidak semuanya mempunyai pemahaman yang merata karena masih adanya sebagian dari anggota KUBE berpendidikan paling rendah hanya sampai bangku sekolah dasar mengakibatkan hambatan dalam proses pelaksanaan. Pada dimensi disposisi masih kurangnya kesadaran dari sebagian anggota KUBE atau para pelaksana di lapangan dalam menjalankan program kegiatan. Dan pada dimensi struktur birokrasi masih kurangnya kesadaran dari para pelaksana lapangan dalam mentaati standar operasional yang telah ditetapkan guna kelancaran dan meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan; Usaha Ekonomi Produktif.*

PENDAHULUAN

Usaha Ekonomi Produktif merupakan upaya peningkatan kualitas serta kesejahteraan masyarakat. Program Usaha Ekonomi Produktif atau lebih dikenal UEP merupakan salah satu bentuk Bantuan Sosial dari Pemerintah kepada masyarakat atau juga Kelompok Usaha Bersama disebut KUBE, sebagai bentuk kepedulian serta yang menjadi fokus utama adalah ingin meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, serta meringankan kemiskinan.

Hal ini juga didasari salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang 1945 alinea ke 4. Kesejahteraan umum diwujudkan melalui Program Pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan merata di segala bidang kehidupan bernegara. kesejahteraan bersifat subyektif dimana setiap orang mempunyai pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda terhadap faktor-faktor yang menentukan kesejahteraan. Seseorang dapat dikatakan hidup sejahtera jika orang tersebut mampu mencukupi kebutuhan hidup, baik secara Material maupun Spiritual.

Menurut Kusmana, E., & Garis, R. R. (2019) bahwa untuk mewujudkan pertanian yang tangguh diperlukan sumberdaya manusia berkualitas melalui penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok yang

mendukung sistem agribisnis berbasis pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan

Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial UEP Kepada KUBE untuk Penanganan Fakir Miskin berisikan gagasan Pemberian UEP kepada KUBE sebagai upaya untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dalam :

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
3. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi

kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

4. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
5. Pendamping Sosial KUBE adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan KUBE agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya.
6. Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

KUBE dibentuk dengan kriteria:

- a. Mempunyai potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
- b. Mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan/nama lain dalam kecamatan yang sama; dan
- c. Mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 20 (dua puluh) kepala keluarga serta pengurus KUBE terdiri atas :

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara dan,
- d. Anggota

Pengurus KUBE dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok dan Pembentukan KUBE difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Berikut ini syarat-syarat menjadi anggota KUBE diantaranya :

- a. Kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga;
- b. Telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;
- c. Berdomisili tetap dan memiliki identitas diri; dan
- d. Memiliki potensi dan keterampilan.

Dalam proses pembentukan Kelompok Usaha Bersama atau sering disebut KUBE terdapat langkah-langkah yang harus dijalankan diantaranya adalah :

- a. Pembentukan KUBE diajukan oleh kelompok masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- b. Pembentukan KUBE dibantu pendamping sosial KUBE.
- c. Dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data terpadu

- Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
- d. Dinas sosial daerah kabupaten/kota mengusulkan calon KUBE berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kepada Menteri Sosial c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau unit kerja eselon II yang menangani KUBE dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi.
 - c. memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang bersifat UEP;
 - d. aktif dalam proses usaha KUBE;
 - e. membayar iuran kesetiakawanan sosial yang telah ditentukan oleh kelompok;
 - f. menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - g. menanggung bersama kerugian usaha kelompok.

Keanggotaan KUBE berakhir apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak aktif secara permanen;
- d. Pindah ke kecamatan lain;
- e. Tidak menaati aturan dalam kelompok;
- f. Sakit permanen sehingga tidak bisa beraktifitas; dan/atau
- g. Melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Anggota KUBE mempunyai hak:

- a. memilih/dipilih menjadi pengurus;
- b. mengemukakan pendapat dan gagasan;
- c. mengelola usaha dan/atau kegiatan;
- d. mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama;
- e. menerima bagian dari hasil usaha; dan
- f. ikut merumuskan aturan kelompok.

Anggota KUBE berkewajiban:

- a. mematuhi aturan kelompok yang telah disepakati bersama;
- b. menghadiri dan aktif dalam rapat anggota;
- a. membentuk KUBE;
- b. memverifikasi calon penerima bantuan;
- c. menyiapkan calon penerima bantuan;
- d. menyiapkan rencana anggaran biaya;
- e. memberikan bimbingan teknis kepada KUBE;
- f. memberikan bimbingan motivasi sosial;
- g. mendampingi pelaksanaan UEP yang dilaksanakan oleh KUBE;
- h. memantau pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- i. membantu dalam penyusunan laporan kegiatan.

Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, pendapatan, serta mengentaskan kemiskinan. Dan juga perlu adanya pendampingan dari para ahli serta Pemerintah Daerah yang membidangi dapat memberikan saran

serta pengetahuan terkait bagaimana Implementasi Kebijakan yang dilakukan serta sejauhmana pemerintah melakukan sosialisasi dan monitoring lapangan agar dalam menjalankan Usaha Ekonomi Produktif ini berjalan dengan baik dan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

KAJIAN PUSTAKA

Adapun menurut Edward III (Agustino, 2017 : 137) bahwa dalam mengimplementasikan suatu Kebijakan ada empat faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi/Sikap para pelaksana
4. Struktur Birokrasi

Dengan demikian maka Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Produktif agar dapat berjalan dengan baik harus mengacu pada kebijakan dan strategi pengelolaan yang baik.

Wahab (2014:64) mengemukakan pendapat sebagai berikut:

“Implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang) peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden)”.

Selanjutnya Agustino (2016:153) mengemukakan pendapat sebagai berikut:

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijaksanaan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kcdengarannya mengenakan bagi telinga para pcmimpin dan para pcmilih yang mendengarkannya. dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya

dalam bentuk yang memuaskan semua orang”.

Dari uraian diatas bahwa implementasi merupakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

METODE

Jenis Penelitian

Desain penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara Sistematis, Faktual, dan Akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian Kualitatif Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, atau kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrument penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Desain penelitian Kualitatif Deskriptif bertujuan untuk menggali mengenai Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan.

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Usaha ekonomi Produktif oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan terhadap keadaan masyarakat yang berada pada garis kemiskinan. Dengan adanya Usaha ekonomi Produktif diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja serta ketahanan pangan bagi masyarakat lokal.

Adapun sub variable dalam penelitian ini adalah empat dimensi yang sangat menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan menurut Edward III (Agustino, 2017:137) yang meliputi dimensi sebagai berikut :

1. Komunkasi, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
 - a. Adanya penyampaian atau sosialisasi Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Produktif.
 - b. Adanya kejelasan informasi Usaha Ekonomi Produktif.
 - c. Konsistensi penerapan kebijakan dari KUBE terhadap Usaha Ekonomi Produktif.
2. Sumber daya, dengan indikator-indikatornya sebagai berikut :
 - a. Adanya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai dalam mengimplementasikan kebijakan Usaha Ekonomi Produktif.
 - b. Ketersediaan anggaran dalam implementasi Usaha Ekonomi Produktif.
 - c. Adanya dukungan sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan kebijakan Usaha Ekonomi Produktif
3. Disposisi, dengan indikator-indikatornya sebagai berikut :
 - a. Adanya keseriusan dari semua Pihak yang terlibat dalam menjalankan Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Produktif.
 - b. Adanya dorongan motifasi dari pemerintah pusat maupun daerah dalam Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Produktif.
 - c. Adanya Pengawasan yang ketat dari pendamping KUBE dalam pengelolaan anggaran.
4. Struktur Birokrasi, dengan indikator-indikatornya sebagai berikut :
 - a. Adanya kejelasan keanggotaan kelompok dalam menjalankan kebijakan Usaha Ekonomi Produktif.
 - b. Adanya standar operasional sebagai pedoman dalam menjalankan implementasi kebijakan Usaha Ekonomi Produktif.
 - c. Adanya koordinasi antara pelaku dan pemerintah pusat/daerah agar tercipta kesinambungan dalam menjalankan implementasi kebijakan Usaha Ekonomi Produktif.

Sedangkan Sugiono (2011:21) mengemukakan pendapatnya terkait metode penelitian Kualitatif Deskriptif, yaitu :

“Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari – November 2021 guna mendapatkan informasi terkait Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Produktif oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan dengan tempat dilakukannya Penelitian dilaksanakan di Desa Tangkolo Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan sebagai bahan mencari informasi dari pelaku Usaha Ekonomi Produktif.

Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi Subjek dalam Penelitian ini adalah para pelaku atau yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Kuningan. Dimana peneliti melakukan pengambilan data di Desa Tangkolo Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan sebagai tempat pengambilan data.

Procedur

Dalam penelitian ini penulis melakukan reduksi data guna merangkum dan mengkategorikan, memilah-milah hal yang dianggap penting dan pokok. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran

jas dan mempermudah dalam mengumpulkan data selanjutnya. Dalam reduksi data ini, peneliti mengumpulkan berbagai data yang diperoleh di lapangan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan terhadap Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Setelah data tersebut dikumpulkan dilakukan seleksi untuk memilah-milah data yang dianggap sesuai dengan penelitian, dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian.

Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang masalah penelitian. Menurut Moleong (2006:147) berpendapat bahwa “Sumber data utama dalam kualitatif adalah kata-kata dan Tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Dari sumber data itu diperoleh keterangan yang berguna untuk mendukung proses deskripsi dan analisa masalah penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengambilan data melalui informan dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling.

Adapun sumber data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah ;

1. Informan yaitu “orang yang dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian”. (Moleong, 2006:132).

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kuningan sebanyak 1 orang
- b. Kepala Desa Tangkolo 1 orang.
- c. Perwakilan pelaku Usaha Ekonomi Produktif sebanyak 3 orang

Dengan demikian maka penulis mengambil informan sebanyak 5 orang.

2. Dokumen

Pada umumnya data yang tercantum dalam berbagai jenis dokumen itu merupakan satu-satunya alat untuk mempelajari permasalahan tertentu, adapun dokumen yang dipakainya oleh peneliti yaitu berupa tulisan atau catatan transkrip, buku, laporan, artikel dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Maksudnya untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Produktif oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan serta data-data yang terkait dengan fokus penelitian.

Sedangkan Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku dan bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti penulis.

2. Studi Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dengan cara :

- a. Observasi, yaitu memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian, observasi yang dilakukan adalah observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen terhadap objek.

- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dalam pelaksanaannya penulis melakukan wawancara langsung dengan pelaku Usaha Ekonomi Produktif serta lembaga atau instansi terkait yang ikut serta dalam menjalankan Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Produktif.

Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif, menurut Moleong (2006:103) adalah : “*Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola , kategori dan situasi uraian dasar*”. Masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian kualitatif adalah dalam hal menganalisis data. Ialah belum ada prosedur yang baku yang dapat dijadikan pedoman dalam menganalisis data. Oleh karena itu peneliti diharuskan mencari sendiri metode atau cara yang dianggap sesuai dengan sifat penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara guna

mendapatkan data yang dibutuhkan serta berkaitan dengan masalah penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Selain wawancara penulis melakukan observasi dengan menggunakan pedoman observasi.

Analisis data hasil wawancara dan observasi itu dilakukan sesuai dengan pendapat Moleong (2006:103) yakni melalui langkah langkah sebagai berikut :

1. Setiap informasi atau data yang diperoleh, baik melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi dianalisis sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang ada di lapangan;
2. Penganalisisan dilakukan setiap selesai pengumpulan data yang diikuti dengan interpretasi dan elaborasi untuk menunjukkan makna yang terkandung didalamnya;
3. Membuat kategorisasi dan unitisasi data dengan mengkodekan data, sehingga data mentah yang terkumpul dapat ditransformasikan dengan sistematis menjadi unit-unit yang dapat dipilahkan menurut karakteristiknya. Proses unitisasi ini dilakukan bukan saja setelah data terkumpul semua. Akan tetapi dilakukan selama proses pengumpulan data;
4. Mengadakan triangulasi, yaitu membandingkan informasi data yang sama diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data (Observasi, Wawancara) disamping membandingkan informasi yang

sama yang diperoleh dari berbagai sumber;

5. Mengadakan member check dengan pegawai sebagai sumber utama informasi (data) dalam penelitian ini. Kegiatan member check ini penulis lakukan setiap selesai melakukan observasi dan wawancara. Sedangkan member check terakhir dilakukan setelah selesai mengumpulkan data secara keseluruhan;
6. mengadakan diskusi dengan teman-teman dalam usaha menguji validitas-data yang terkumpul;
7. Memberikan tafsiran sebagai usaha memberikan makna yang terkandung dan diperoleh dalam penelitian ini;

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Produktif oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan.

Keberadaan Usaha Ekonomi Produktif berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin. Keberadaan Usaha Ekonomi Produktif yang ada di Kabupaten Kuningan salah satunya ada di Desa Tangkolo Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan, berbentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berupa bantuan usaha Ternak Penggemukan Domba guna

meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan serta mengentaskan kemiskinan. sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Produktif yang ada di Desa Tangkolo.

Pengertian Usaha Ekonomi Produktif

Usaha ekonomi Produktif atau UEP merupakan kegiatan yang berkaitan dengan bidang ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga atau kelompok usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja serta ketahanan pangan bagi masyarakat local.

Maksud dari Usaha Ekonomi Produktif ini adalah mendorong terjadinya peningkatan aktifitas dan kreatifitas di daerah miskin. Pemberian modal untuk usaha ini berkisar 2.500.000-7.500.000. melalui Lembaga keuangan yang bersifat meminjamkan dan berbunga rendah. Usaha ini biasanya disesuaikan dengan potensi lingkungan serta keterampilan yang dimiliki pengurus atau anggotanya. Jenis Usaha ekonomi Produktif yang dapat dijalankan diantaranya yaitu Usaha Kerajinan, Perbengkelan, Olahan hasil bumi, Peternakan, Pembibitan dan sebagainya.

Di dalam menjalankan Usaha Ekonomi Produktif agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran dan berkesinambungan, maka perlu diperhatikan 3 strategi utama yang harus dijalankan dalam mengelola

program UEP dan KUBE, ke tiga strategi tersebut adalah Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengembangan.

Tujuan dan manfaat Usaha Ekonomi Produktif

Tujuan umum dari penyelenggaraan UEP atau KUBE adalah :

1. Meningkatkan kualitas hidup PMKS.
2. Meningkatkan peran dalam proses industrialisasi, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM yang disertai penguatan kelembagaan.
3. Meningkatkan peran masyarakat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, serta peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Meningkatkan keberdayaan dan kualitas masyarakat pedesaan, sebagai salah satu modal sosial berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar.
5. Peningkatan dukungan bagi pembentukan dan pengembangan Kluster Industri berbasis teknologi serta peningkatan dukungan bagi penerapan Teknologi Tepat Guna.
6. Program pengembangan komoditi unggulan daerah.

Dengan melihat tujuan dari Usaha Ekonomi Produktif diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa manfaat dari Usaha ekonomi Produktif bagi masyarakat adalah meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan

kerja serta ketahanan pangan bagi masyarakat lokal.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Meter dan Horn (Wahab, 2014:65) menyatakan bahwa : Proses implementasi adalah sebagai berikut :

“those action by public or private individuals groups that are directed the achivement of objectives set forth in prior decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Menurut pendapat di atas, bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Adapun Wahab (2014: 59) dengan tegas menyatakan bahwa : *“ The execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue frints file jaccket unless they are implemented* (pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting. bahkan mungkin lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan

sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Sedangkan menurut Edward III (2010:96) mengemukakan bahwa ada 4 (empat) faktor yang menentukan keberhasilan dalam Implementasi Kebijakan antara lain yaitu : *Pertama*, Variabel Komunikasi, komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan” Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. *Kedua*, Variabel Sumber Daya, sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. *Ketiga*, Variabel Disposisi/Sikap Pelaksana, dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. *Keempat*, Variabel Struktur Birokrasi, mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organnisasi dan sebagainya. Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan bisa

jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi.

Dalam mengimplemetasikan suatu kebijakan publik, factor yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah kepatuhan dari target group (masyarakat) dalam rangka menunjang keberhasilan suatu program. Factor-faktor penyebab mengapa orang tidak mematuhi atau melaksanakan suatu kebijakan publik, teramat penting untuk diketahui oleh para pembuat kebijakan (*policy maker*) maupun implementator.

Pendekatan Implementasi Kebijakan

Dari setiap kebijakan, keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dilihat dan dicermati dari sudut kemampuan nyata dalam meneruskan berbagai program-program sebagaimana direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu sebaiknya kebijakan publik sebaiknya bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan kelompok atau individu yang menjadi sasaran sehingga manfaat dapat dirasakan sesuai tujuan dari kebijakan public dimaksud. Untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan perlu dilakukan berbagai pendekatan, seperti di Desa Tangkolo Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan, Usaha Ekonomi Produktif yang dimiliki adalah di bidang Peternakan yaitu Ternak Penggemukan Domba dimana sesuai dengan langkah langkah kebijakan yang di berikan oleh pemerintah bahwa bantuan yang di berikan harus sesuai dengan kebutuhan

dan juga minat dari masyarakat atau kelompok masyarakat supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Wahab (2013:98) menyatakan untuk mengimplementasikan kebijakan dapat digunakan beberapa pendekatan antara lain Pendekatan Struktural (*structural approach*), adalah menganggap bahwa kepercayaan terhadap prinsip-prinsip universal dan organisasi yang baik kini harus diubah, yakni perhatian pada keyakinan bahwa struktur organisasi tertentu hanya cocok pada tugas tertentu dan lingkungan tertentu pula. Pendekatan Procedural dan Manajerial (*procedural and managerial approach*), adalah pendekatan terhadap prosedur dan jaringan kerja dari implementasi kebijakan, disini implementasi kebijakan akan mengalami tahap-tahap berupa perencanaan jaringan kerja sampai dengan pengawasan. Pendekatan ini memungkinkan untuk memperkirakan secara tepat jangka waktu penyelesaian tiap-tiap tugas, dengan jalan memonitor setiap peluang waktu yang ada bagi penyelesaian tugas dalam jaringan kerja. Pendekatan Keprilakuan (*behavioural approach*), adalah pendekatan memusatkan pada sifat-sifat perilaku masyarakat. Perilaku manusia beserta segala sikapnya harus pula dipengaruhi kalau kebijaksanaan ingin dapat diimplementasikan dengan baik. Pendekatan keprilakuan diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan. dan Pendekatan Politik (*political approach*), istilah politik

disini tidak semata-mata terbatas pada partai politik. Dalam pembahasana ini partai politik lebih mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh diantara dan didalam lingkungan organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka keberhasilan implementasi kebijakan itu dapat dilihat dari berbagai aspek yang mempengaruhinya seperti pendekatan yang digunakan sehingga suatu kebijakan bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan kelompok dan individu yang menjadi sasaran sehingga manfaat dapat dirasakan sesuai dengan tujuan dari kebijakan publik.

Untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, Santoso (2011:70-71) menyatakan bahwa setidaknya ada beberapa elemen-elemen tertentu yang harus dipenuhi, seperti :

1. Kreasi dan staffing agent pelaksana baru, guna mengimplementasikan kebijakan baru atau menetapkan tanggungjawabimplementasi kepada personil dan agen yang ada.
2. Penerjemah dimagsud da tujuan legislative kedalam aturan operasionalyang baik, perlu pengembangan garis keterpaduan bagi para implementator.
3. Koordinasi sumber daya agen dan pelayanan terhadap kelompok sasaran, pengembangan devisi tanggungjawab dalam agen antara agen-agen yang terkait.
4. Alokasi sumber dayaguna kesempurnaan dampak kebijakan.

Selanjutnya Suryaningrat (2013:157) berpendapat bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat tiga unsur penting dalam menunjang keberhasilan implenetasi kebijakan, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
2. Target group atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dan perubahan serta peningkatan.
3. Unsur pelaksana organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi.

KESIMPULAN

Kajian terhadap Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Produktif oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan dengan menggunakan teori Edward III dengan empat faktor yang menentukan keberhasilan Implementasi Kebijakan antara lain yaitu komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap para pelaksana dan Struktur Birokrasi maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. bahwa kebijakan yang diidealkan harus mudah dilaksanakan. Sehingga dalam pelaksanaannya mendapatkan hasil yang maksimal.
2. hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya sebagian dari para pelaksana lapangan kurang pro aktif terhadap kebijakan, rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh

3. sebagian dari anggota KUBE menyebabkan kesulitan dalam memahami dan mempelajari apa yang telah diinformasikan atau disosialisasikan oleh Pendamping KUBE atau pemerintah terkait kebijakan Usaha Ekonomi Produktif dapat diatasi.
4. Organisasi pelaksana atau pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dapat menunjukkan keseriusan serta pentingnya komunikasi, dukungan serta motivasi dari pemerintah daerah terkait agar dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Abdul Wahab, 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kusmana, E., & Garis, R. R. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian Oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 460-473.
- Moleong, J, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta.
- Amir Santoso. 2011. *Analisis Kebijakan Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Gramedia
- Suryaningrat, Bayu. 2013. *Kebijakan Pemerintah*, Jakarta : CV Angkasa Baru.